



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUNIANTO SIMARE MARE
2. Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT
3. NHK : 524105

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m²/45 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/40 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m²/80 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 804 m²/80 m² di KAB / KOTA TAPANULI TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 748.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2,4 AT TYPE V Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 S CVT GR SPORT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY PRESTIGE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. MOTOR, YAMAHA BEJ A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	139.041.898
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.137.041.898
III. HUTANG	Rp.	911.449.907
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.225.591.991

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.